

## Determinasi Kesempatan Kerja di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009-2023

Deny Satriawan<sup>1\*</sup>, Muhammad Irwan<sup>2</sup>, Luluk Fadliyanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram

<sup>1\*</sup>dsatriawan80@gmail.com

### ABSTRACT

*Employment opportunities are a crucial indicator in assessing the stability and economic growth of a region. This study aims to analyze the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), investment, regional minimum wage, and regional government capital expenditure on employment opportunities in West Lombok Regency during the period 2009–2023. A quantitative approach with a correlational design was employed to examine the relationships among variables using secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and relevant institutions. The results indicate that GRDP and investment have a positive and significant effect on the increase in employment opportunities. The growth of GRDP reflects higher production capacity, while investment, both in the form of Domestic Investment (PMDN) and Foreign Investment (PMA), acts as a catalyst for the creation of new jobs. The increase in the minimum wage has a limited impact, suggesting the need to balance labor interests with business capabilities. Meanwhile, regional government capital expenditure allocated for infrastructure and public facilities has been proven to support both direct and indirect job creation. These findings underscore the importance of synergy between fiscal policy, investment, and strengthening the real economic sector in expanding inclusive employment access. This study is expected to serve as a reference for the formulation of regional economic development policies oriented towards enhancing community welfare through the provision of sustainable employment opportunities.*

**Keywords:** *Employment opportunities, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Investment, Minimum wage.*

### ABSTRAK

Kesempatan kerja merupakan indikator krusial dalam menilai kestabilan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, upah minimum kabupaten, dan belanja modal pemerintah daerah terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat selama periode 2009–2023. Pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional digunakan untuk menguji hubungan antar variabel menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja. Peningkatan PDRB mencerminkan kapasitas produksi yang lebih tinggi, sementara investasi, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), berperan sebagai katalis dalam pembukaan lapangan kerja baru. Kenaikan upah minimum memiliki dampak terbatas, yang memerlukan keseimbangan antara kepentingan tenaga kerja dan kemampuan dunia usaha. Sementara itu, belanja modal pemerintah daerah yang dialokasikan untuk infrastruktur dan fasilitas publik terbukti mendukung penciptaan kerja langsung

maupun tidak langsung. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, investasi, dan penguatan sektor ekonomi riil dalam memperluas akses kerja yang inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** investasi, Kesempatan kerja, PDRB, upah minimum.

## PENDAHULUAN

Kesempatan kerja merupakan indikator penting dalam menilai stabilitas dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Peluang kerja yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dalam konteks ini, peluang kerja tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi yang makro, tetapi juga menjadi cerminan kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, dan perkembangan investasi. Studi oleh Ulhafiah dan Arianti (2023) menyoroti bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkontribusi positif terhadap peningkatan peluang kerja di DKI Jakarta. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Nurhardiansyah dan Santosa (2017) di Pulau Jawa, di mana indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan inflasi juga memainkan peran signifikan.

Di Jawa Timur, faktor upah minimum kabupaten dan tingkat pendidikan juga menunjukkan pengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja (Istiyani et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa variabel ekonomi seperti upah dan PDRB tidak dapat dipisahkan dari variabel sosial seperti pendidikan dalam memengaruhi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan ketenagakerjaan harus bersifat menyeluruh dan mempertimbangkan integrasi antar sektor. Lebih lanjut, peran investasi dalam memperluas kesempatan kerja menjadi semakin nyata. Munthe (2024) mencatat bahwa investasi memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja di Sumatera Utara, dan hasil ini sejalan dengan temuan Afrien (2024) yang menyoroti kontribusi investasi domestik dan belanja modal dalam sektor manufaktur Indonesia dari tahun 2009 hingga 2023.

Kebijakan fiskal pemerintah daerah juga terbukti berdampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Pratiwi dan Indrajaya (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali. Dengan kata lain, sinergi antara kebijakan fiskal dan investasi swasta menjadi kunci dalam membangun struktur ketenagakerjaan yang tangguh dan berkelanjutan. Penelitian Wijayanti dan Mufarrah (2024) di Jawa Tengah juga menegaskan pentingnya variabel seperti rata-rata lama sekolah, investasi, dan PDRB dalam mendukung peluang kerja. Kombinasi dari hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara faktor ekonomi makro dan mikro dalam menciptakan kesempatan kerja yang optimal di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemahaman terhadap dinamika pasar kerja menjadi sangat relevan mengingat wilayah Kabupaten Lombok Barat mengalami perubahan ekonomi yang

signifikan dalam kurun waktu 2009–2023. Analisis terhadap variabel PDRB, investasi, upah minimum kabupaten, dan belanja modal pemerintah daerah menjadi penting dalam menilai faktor-faktor yang memengaruhi peluang kerja. PDRB sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah dapat mencerminkan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), mendorong diversifikasi sektor ekonomi yang dapat memperluas kebutuhan tenaga kerja (Munthe, 2024; Afrien, 2024).

Upah minimum kabupaten juga memiliki pengaruh terhadap partisipasi angkatan kerja. Kenaikan upah minimum dapat menjadi insentif bagi pencari kerja, namun juga harus seimbang dengan kemampuan membayar dari dunia usaha. Belanja modal pemerintah daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik tidak hanya menciptakan pekerjaan secara langsung tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas jangka panjang. Oleh karena itu, sinergi antara keempat variabel ini berpotensi besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan produktif di Lombok Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara empiris bagaimana PDRB, investasi, upah minimum kabupaten, dan belanja modal pemerintah daerah memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Barat selama periode 2009–2023. Dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Melalui pendekatan yang komprehensif, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan filosofi positivisme, yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel melalui data numerik dan analisis statistik. Metode ini dianggap tepat karena penelitian berfokus pada determinasi kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu 2009–2023, dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan secara sistematis dan objektif. Pendekatan yang digunakan adalah korelasional, untuk menguji sejauh mana perubahan pada variabel bebas (seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah) dapat memengaruhi variabel terikat, yaitu kesempatan kerja. Analisis statistik dilakukan guna menguji hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antar variabel yang terukur secara kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka. Data dokumentasi diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik dan situs pemerintah, mencakup variabel-variabel ekonomi yang relevan. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh teori dan informasi pendukung dari literatur

sebelumnya. Populasi penelitian terdiri atas data makroekonomi dan ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Barat, sementara sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan data tahun 2009–2023. Variabel yang digunakan adalah kesempatan kerja (Y) sebagai variabel dependen, serta pertumbuhan ekonomi (X1), investasi (X2), upah minimum kabupaten (X3), dan pengeluaran pemerintah (X4) sebagai variabel independen. Setiap variabel memiliki definisi operasional yang jelas dan diukur dalam satuan yang sesuai. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, dengan durasi enam bulan dari Juli hingga Desember 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Lombok Barat terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berbatasan dengan Samudera Hindia di selatan, Selat Lombok dan Kota Mataram di barat, Kabupaten Lombok Tengah di timur, dan Kabupaten Lombok Utara di utara. Kabupaten ini terdiri atas 10 kecamatan, dengan ibu kota berada di Kecamatan Gerung. Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 922,91 km<sup>2</sup> dan dihuni oleh 744.309 jiwa (2023), dengan kepadatan penduduk 816 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Labuapi merupakan yang paling padat, disusul oleh kecamatan-kecamatan penyangga Kota Mataram seperti Lingsar, Gunungsari, Narmada, dan Batulayar.

### 2. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja di Lombok Barat selama tahun 2009–2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2009 mencatat angka tertinggi yakni 362.952 jiwa, tetapi menurun drastis pada 2010 akibat pemisahan Kabupaten Lombok Utara. Penurunan signifikan juga terjadi pada 2018 akibat gempa bumi. Ketidakstabilan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, terbatasnya lapangan kerja, kualitas SDM yang rendah, serta bencana alam dan pandemi. Sebagian besar penduduk usia kerja bekerja di sektor jasa (54,77%), pertanian (23,23%), dan industri (22,00%).

### 3. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat diukur melalui PDRB atas dasar harga konstan. Selama periode 2009–2023, pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 4,09% per tahun. Walau PDRB meningkat dari Rp 6,685 triliun (2009) menjadi Rp 11,379 triliun (2023), laju pertumbuhan sempat menurun tajam pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Tahun 2017 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 6,54%, menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan bencana.

#### 4. Investasi

Investasi di Lombok Barat, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), bersifat fluktuatif. Nilai tertinggi tercatat pada 2017 sebesar Rp 2,563 triliun, dengan dominasi PMDN (71,76%). Sementara nilai terendah terjadi pada 2010, yaitu hanya Rp 149 juta. Investasi sangat penting karena berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan *output* ekonomi daerah.

#### 5. Upah Minimum Kabupaten

Upah minimum di Lombok Barat terus meningkat dari Rp 650.000 pada 2008 menjadi Rp 2.371.407 pada 2023. Namun, pertumbuhannya tidak selalu stabil. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2009 (28,08%), sementara tahun 2021 tidak mengalami kenaikan akibat pandemi. Kenaikan upah minimum dipengaruhi oleh pertimbangan biaya hidup, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 6. Belanja Modal Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah komponen penting dalam pembangunan daerah, digunakan untuk pembelian aset tetap seperti tanah, gedung, dan infrastruktur. Realisasi belanja modal selama 2009–2023 mencapai Rp 3,542 triliun, dengan nilai tertinggi pada 2019 sebesar Rp 444,728 miliar. Tahun 2018 terjadi lonjakan kebutuhan belanja modal karena kerusakan infrastruktur pasca gempa bumi. Belanja modal pemerintah digunakan untuk mendorong pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi serta membuka lapangan kerja baru.

Setelah melakukan pengujian hipotesis dan estimasi pada model maka akan ditelaah secara lebih lanjut mengenai pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Kabupaten dan Belanja Modal terhadap kesempatan kerja. Di bawah ini merupakan hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas terhadap penyerapan tenaga kerja :

#### **Pengaruh PDRB terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Lombok Barat**

Penelitian mengenai hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat tahun 2009–2023 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja. Koefisien regresi sebesar 0.342 dan nilai t sebesar 2.249, yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2.228, serta tingkat signifikansi 0.048 yang lebih kecil dari 0.05, mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDRB secara langsung mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, setiap peningkatan satu satuan pada PDRB diperkirakan mampu meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0.342 satuan.

Hasil ini memperkuat teori ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan *output* akan memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dalam konteks kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan

PDRB melalui penguatan sektor riil, pembangunan infrastruktur, dan dukungan terhadap UMKM merupakan langkah strategis untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Nurhardiansyah, Istiyani, dan Wahyu (2017), yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa pada periode 2006–2015, di mana peningkatan *output* ekonomi secara langsung meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Penelitian oleh Istiyani et al. (2022) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa PDRB menjadi salah satu variabel kunci dalam menciptakan kesempatan kerja di Jawa Timur pada tahun 2015–2019, bersamaan dengan faktor pendidikan.

Selain itu, Hailuddin et al. (2023) mengungkapkan bahwa di Kabupaten Lombok Barat terdapat lima sektor utama penyumbang lapangan kerja, yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, serta jasa keuangan. Namun, sektor jasa kini mendominasi karena alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Sementara itu, studi oleh Ulhafiah dan Arianti (2021) menunjukkan bahwa di DKI Jakarta, PDRB justru berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kesempatan kerja, yang menandakan bahwa karakteristik wilayah seperti struktur ekonomi dan arus migrasi memengaruhi arah hubungan tersebut.

Bukti empiris dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa PDRB merupakan indikator penting dalam mendorong penciptaan kesempatan kerja. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan mencakup diversifikasi sektor unggulan, penguatan sumber daya manusia, kemudahan investasi, dan penyederhanaan perizinan usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam perumusan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berfokus pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Investasi Terhadap Kesempatan Kerja**

Penelitian mengenai pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat periode 2009–2023 menunjukkan hasil signifikan. Dengan nilai *t*-hitung sebesar 2.754 dan signifikansi 0.020 ( $< 0.05$ ), investasi terbukti secara statistik berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja. Koefisien regresi sebesar 0.014 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan investasi mampu menaikkan kesempatan kerja sebesar 0.014 satuan. Hal ini memperjelas peran strategis investasi sebagai katalisator ekonomi daerah, khususnya melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.

Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Syafaruddin Munthe (2023) di Sumatera Utara yang menemukan bahwa baik investasi domestik maupun asing secara signifikan meningkatkan jumlah lapangan kerja. Investasi dipandang sebagai solusi utama untuk mengatasi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penambahan modal dari investor terbukti mampu meningkatkan kapasitas

produksi, membuka unit usaha baru, serta menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti logistik dan perdagangan. Kesamaan pola ini antara Lombok Barat dan Sumatera Utara menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kebijakan investasi dan penciptaan kerja.

Selain itu, penelitian oleh Rahmannisa Mufarrah (2022) di Jawa Tengah pada periode 2018–2022 juga mendukung temuan serupa. Investasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja, bahkan ketika dibandingkan dengan variabel lain seperti upah minimum. Penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran investasi mencerminkan kepercayaan terhadap potensi ekonomi daerah dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha serta ekspansi bisnis yang menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah dianjurkan untuk terus memperkuat daya tarik investasi melalui kemudahan perizinan, pemberian insentif fiskal, dan perbaikan infrastruktur.

Namun, studi oleh Tandiawan, Naukoko, dan Wauran (2012) di Kota Manado menunjukkan bahwa investasi tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap kesempatan kerja jika tidak didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kasus tersebut, belanja pemerintah justru lebih berpengaruh dibanding investasi swasta. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas investasi sangat tergantung pada konteks struktural, kesiapan infrastruktur, dan dukungan kebijakan lokal. Dengan demikian, keberhasilan Kabupaten Lombok Barat dalam mengoptimalkan dampak investasi terhadap kesempatan kerja dapat menjadi contoh bagi daerah lain, asalkan faktor pendukungnya dikelola secara sinergis dan berkelanjutan.

### **Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kesempatan Kerja**

Penelitian mengenai pengaruh UMK terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat selama 2009–2023 menunjukkan bahwa UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t*-hitung sebesar 8.233 yang lebih besar dari *t*-tabel 2.228, serta signifikansi 0.000 (<0.05). Koefisien regresi sebesar 0.586 menandakan bahwa kenaikan satu satuan UMK dapat meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0.586 satuan. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa kenaikan UMK tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru serta meningkatkan partisipasi tenaga kerja dalam sektor formal. Kebijakan UMK yang disusun secara cermat mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan (Sumber: Hasil penelitian primer, 2023).

Penelitian ini sejalan dengan studi oleh Danish Sahil dkk. (2023) yang menganalisis pengaruh UMR terhadap kesempatan kerja di Sumatera Utara. Mereka menemukan bahwa UMR berpengaruh positif signifikan terhadap kesempatan kerja melalui mekanisme peningkatan produktivitas tenaga kerja dan motivasi ekonomi berdasarkan teori upah efisiensi. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Fara Eka Wahyuni dkk. (2021) di Jawa Timur, yang menyatakan bahwa UMP mampu menarik lebih banyak orang masuk ke angkatan kerja dan menurunkan tingkat

pengangguran terbuka. Konsistensi temuan ini menguatkan peran strategis upah minimum sebagai instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan produktif.

Namun, terdapat pula pandangan yang berbeda dari penelitian Agam Nurhardiansyah dkk. (2017), yang menyatakan bahwa kenaikan UMP di beberapa wilayah Pulau Jawa berdampak negatif terhadap kesempatan kerja. Hal ini terjadi karena beban biaya tenaga kerja yang meningkat mendorong pelaku usaha melakukan efisiensi, bahkan pengurangan tenaga kerja. Penelitian Nanik Istiyani dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa di beberapa wilayah Jawa Timur, UMK tidak signifikan memengaruhi kesempatan kerja, dan faktor lain seperti PDRB serta pendidikan justru lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak UMK sangat tergantung pada kondisi ekonomi lokal, struktur industri, serta kesiapan sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja.

Kebijakan UMK yang dirancang secara adaptif dan mempertimbangkan daya serap ekonomi lokal dapat memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja. Dukungan literatur dari Mankiw dalam Priyono dan Zainuddin Ismail (2012) juga menegaskan bahwa upah tinggi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui berkurangnya perputaran karyawan dan meningkatnya kualitas serta etos kerja. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja diperlukan untuk menyusun kebijakan upah yang seimbang, guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan kompetitif.

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesempatan Kerja**

Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat selama periode 2009–2023. Hal ini dibuktikan melalui nilai  $t$  sebesar 8,457 dengan signifikansi 0,000, yang berarti bahwa hipotesis alternatif diterima. Setiap peningkatan belanja modal terbukti mendorong bertambahnya peluang kerja di daerah tersebut, baik secara langsung melalui proyek-proyek pembangunan maupun secara tidak langsung lewat efek pengganda ekonomi. Belanja modal yang dialokasikan untuk infrastruktur dan sektor produktif menciptakan permintaan tenaga kerja baru dan menggerakkan roda perekonomian lokal.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan teori Keynesian yang menekankan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, terutama di daerah yang sedang berkembang. Investasi pemerintah melalui belanja modal menjadi salah satu strategi utama dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Selain menyerap tenaga kerja selama proses konstruksi, infrastruktur baru juga mendorong munculnya aktivitas ekonomi baru pasca pembangunan. Oleh karena itu, belanja modal menjadi alat fiskal yang penting dalam menyejahterakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

Dukungan terhadap temuan ini datang dari penelitian Ni Putu Ambar Pratiwi dan I Gusti Bagus Indrajaya (2019) di Provinsi Bali, yang membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, termasuk belanja modal, memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain oleh



Elvandy Tandiawan, Amran Naukoko, dan Patrick Wauran (2015) di Kota Manado juga menyimpulkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh langsung terhadap penciptaan kesempatan kerja, meskipun tidak sepenuhnya dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Kedua studi ini memperkuat argumen bahwa belanja modal merupakan instrumen strategis dalam mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Misalnya, studi Yetti Anita Sari dkk (2023) di Pulau Jawa menemukan hubungan negatif antara belanja modal dan penyerapan tenaga kerja, yang dipengaruhi oleh tingginya penggunaan teknologi dan karakteristik industri di wilayah tersebut. Penelitian Nidya Listiyono dkk (2021) di Kalimantan Timur juga mencatat bahwa belanja pemerintah tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena fokus pada pembangunan fisik semata. Perbedaan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam merumuskan kebijakan belanja modal. Dengan demikian, Kabupaten Lombok Barat dapat menjadi contoh keberhasilan pengelolaan belanja modal yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja melalui pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal.

### **Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Kabupaten dan Belanja Modal secara Simultan Terhadap Kesempatan Kerja**

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, keempat variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Belanja Modal Pemerintah Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat selama periode 2009–2023. Hal ini dibuktikan dengan hasil Uji F (Simultan) dalam analisis regresi yang menghasilkan nilai F hitung sebesar 44.881 dan signifikansi sebesar 0.000, jauh di bawah ambang 0.05. Hasil ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik dan mampu menjelaskan variasi pada kesempatan kerja secara menyeluruh berdasarkan keempat variabel tersebut.

Analisis lanjutan melalui ANOVA menunjukkan bahwa Mean Square untuk regresi (0.057) jauh lebih besar dibandingkan dengan residual (0.001), serta Total Sum of Squares sebesar 0.239 didominasi oleh nilai regresi (0.226), memperkuat keandalan model. Ini membuktikan bahwa sebagian besar variasi kesempatan kerja dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang diuji. Dengan jumlah observasi selama 15 tahun dan derajat kebebasan yang sesuai, hasil ini menggambarkan kemampuan prediktif model yang tinggi, serta menunjukkan bahwa perubahan pada faktor-faktor ekonomi makro seperti PDRB, investasi, UMK, dan belanja modal secara bersama-sama menentukan dinamika ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Temuan ini sejalan dengan teori-teori ekonomi pembangunan yang menyatakan pentingnya sinergi antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, kebijakan upah, dan belanja publik dalam menciptakan pasar kerja yang produktif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi para pengambil kebijakan di Kabupaten Lombok Barat untuk memprioritaskan

keempat aspek tersebut dalam strategi peningkatan kesempatan kerja. Dengan pendekatan kebijakan yang responsif terhadap faktor-faktor ini, diharapkan akan tercipta pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sumber: *Output SPSS ANOVA*, 2024).

### **Determinasi Kesempatan Kerja di Kabupaten Lombok Barat**

Berdasarkan hasil *Model Summary*, nilai R-Square sebesar 0.947 menunjukkan bahwa model yang menghubungkan PDRB, Investasi, UMK, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah sebagai prediktor terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Lombok Barat selama periode 2009–2023 mampu menjelaskan variabilitas Kesempatan Kerja sebesar 94,7%. Dengan kata lain, hampir seluruh perubahan pada variabel dependen, yaitu kesempatan kerja, dapat dijelaskan secara simultan oleh keempat variabel independen tersebut. Nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1 ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan sangat kuat dan relevan dalam penelitian ini. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0.926 juga menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah sampel dan variabel prediktor, model tetap memiliki daya jelaskan yang sangat tinggi, yakni 92,6%. Adjusted R Square ini penting untuk mengoreksi kemungkinan bias akibat penambahan variabel dalam model.

Secara praktis, semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin besar pula kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini, terdapat sekitar 5,3% (100% - 94,7%) faktor lain di luar model yang mungkin memengaruhi kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat selama periode penelitian dan belum terakomodasi dalam model regresi ini. Faktor-faktor tersebut bisa saja meliputi aspek sosial, kebijakan nasional, perubahan demografi, perkembangan teknologi, maupun faktor eksternal lain yang tidak terukur dalam penelitian ini.

Tingginya nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini memperkuat validitas dan reliabilitas temuan terkait hubungan antara PDRB, Investasi, UMK, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah dengan kesempatan kerja. Hasil ini menegaskan bahwa dinamika kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat selama 15 tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi daerah yang tercermin pada keempat variabel bebas tersebut. Dengan demikian, model regresi yang digunakan mampu merepresentasikan realitas empiris serta memberikan justifikasi yang kuat mengenai pengaruh signifikan variabel ekonomi daerah terhadap penciptaan kesempatan kerja.

Selain itu, perlu diperhatikan pula nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 0.03550, yang menunjukkan besarnya standar *error* dalam memprediksi nilai kesempatan kerja berdasarkan model yang digunakan. Nilai yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa prediksi model memiliki deviasi atau kesalahan yang sangat rendah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

Berdasarkan seluruh hasil uji determinasi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keempat variabel bebas, yaitu PDRB, Investasi, UMK, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2009 hingga 2023 sangat kuat dan signifikan. Dengan proporsi daya jelaskan model sebesar 94,7% (R Square) dan 92,6% (Adjusted R Square) setelah disesuaikan, dapat ditegaskan bahwa model ini telah mampu menangkap hampir seluruh fluktuasi dan faktor utama yang memengaruhi dinamika kesempatan kerja di wilayah dan periode yang dianalisis. Temuan ini memberikan kontribusi penting secara akademis bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi daerah, karena secara empiris membuktikan bahwa optimalisasi variabel ekonomi seperti peningkatan PDRB, peningkatan investasi, penyesuaian UMK yang tepat, serta pelaksanaan belanja modal pemerintah yang efektif sangat penting dalam upaya memperluas kesempatan kerja di tingkat kabupaten.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja di Kabupaten Lombok Barat selama periode 2009-2023 mengindikasikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta belanja modal pemerintah daerah, baik secara individu maupun bersama-sama, memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja di daerah tersebut. Keempat variabel ini terbukti sebagai penentu utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah daerah disarankan untuk menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, mengelola upah minimum secara efektif, serta memaksimalkan penggunaan belanja modal. Model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 94,7% variasi dalam kesempatan kerja, meskipun masih terdapat sekitar 5,3% pengaruh dari faktor lain di luar model yang belum teridentifikasi. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi pembangunan yang menekankan pentingnya kolaborasi faktor-faktor makroekonomi dalam membangun pasar tenaga kerja yang luas dan dinamis.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, peneliti menyarankan agar pemerintah daerah Lombok Barat fokus pada perluasan kesempatan kerja melalui berbagai strategi, seperti meningkatkan PDRB khususnya di sektor padat karya (pertanian, manufaktur, jasa), meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mendorong pengembangan UMKM dengan mempermudah akses permodalan, pelatihan manajemen, dan penyederhanaan regulasi. Selain itu, diperlukan penciptaan iklim investasi yang kondusif, pembangunan infrastruktur pendukung, dan kemitraan antara pemerintah, swasta, serta masyarakat guna mendorong inovasi dalam penciptaan lapangan kerja. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar memperluas variabel penelitian,

memperpanjang periode observasi, dan menggali lebih dalam faktor-faktor eksternal maupun internal lainnya. Penggunaan metode analisis yang lebih beragam serta data primer juga direkomendasikan agar hasil penelitian lebih komprehensif dan relevan bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di Lombok Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrien, R. (2024). *Analisis Pengaruh Investasi dan Belanja Modal terhadap Industri Manufaktur di Indonesia Tahun 2009–2023*.
- Hailuddin et al. (2023). *Analisis Struktur Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Lombok Barat*.
- Istiyani, N., Viphindrartin, S., Nurhardjo, B., & Restiawan, A.I. (2022). *Pengaruh PDRB, UMP, dan Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Timur*.
- Listiyono, N., dkk. (2021). *Pengaruh Investasi, Pendidikan, dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kalimantan Timur*.
- Munthe, S. (2024). *Dampak Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Utara*.
- Nurhardiansyah, A., & Santosa, B. (2017). *Analisis IPM, Inflasi, dan Peluang Kerja di Pulau Jawa*.
- Nurhardiansyah, A., Istiyani, N., & Wahyu, F.P. (2017). *Pengaruh IPM, PDRB, UMP, dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2006–2015*.
- Pratiwi, D. & Indrajaya, I. (2019). *Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Bali*.
- Sari, Y. A., dkk. (2023). *Pengaruh Belanja Modal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa*.
- Tandiawan, E., Naukoko, A., & Wauran, P. (2015). *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado*.
- Ulhafiah, N. & Arianti, F. (2021). *Pengaruh UMP, IPM, dan PDRB terhadap Kesempatan Kerja di DKI Jakarta Tahun 2011–2021*.
- Wijayanti, M., & Mufarra, R. (2024). *PDRB, Investasi, dan Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Tengah*.